

VOLUME 1 NOMOR 2 MEI 2024

Diterima: 12 Mei 2024

Direvisi: 15 Mei 2024

Disetujui: 19 Mei 2024

Collaboration in Implementing Building Permit Agreement (PBG) Towards Sustainable Development and Creating a Better Investment Climate

Kolaborasi Dalam Penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dan Menciptakan Iklim Investasi Yang Lebih Baik

Deny Sanjaya

DPMPTSP Kota Metro

Email: denys4anjaya@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this paper is to evaluate the effectiveness of building permit regulations in promoting safe and sustainable urban development. By analyzing case studies and compliance data, this research assesses its impact on construction quality, safety, and the aesthetics of cities. Additionally, it identifies enforcement challenges and offers potential solutions. The aim is to provide insights for policymakers, urban planners, and developers to enhance regulation effectiveness for the community's benefit. The article adopts a qualitative approach with a descriptive method. Data collection involves examining all relevant primary and secondary legal materials and documentation. A systematic analysis of investment regulations and related documents is conducted, along with literature review through internet searches and journal exploration. References are qualitatively analyzed and presented accordingly. The findings emphasize the importance of collaboration and innovation in advancing urban sustainability. Investments in renewable energy, eco-friendly infrastructure, and community engagement are key. Effective enforcement of building permit regulations is also crucial for creating sustainable environments. Strengthening enforcement, coupled with incentives for developers committed to sustainability, is vital for the future.

Keywords: Collaboration, Building Permits, Sustainable Development, Investment Climate

ABSTRAK

Tujuan makalah ini untuk mengevaluasi efektivitas peraturan persetujuan bangunan dalam mendorong pembangunan perkotaan yang aman dan berkelanjutan. Dengan menganalisis studi kasus dan data kepatuhan, penelitian ini menilai dampaknya terhadap kualitas konstruksi, keselamatan, dan estetika kota. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penegakan peraturan dan menawarkan solusi potensial. Tujuannya adalah memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, perencana kota, dan pengembang untuk meningkatkan efektivitas peraturan demi kepentingan masyarakat. Artikel ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa semua bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan isu inti dan dokumentasi. Analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap regulasi investasi dan dokumen terkait dilakukan secara sistematis (harmonisasi). Tinjauan literatur dilakukan melalui pencarian di internet dan penelusuran jurnal. Referensi kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan sesuai dengan topik penelitian. Hasil analisis bahwa pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam mendorong

keberlanjutan perkotaan. Investasi dalam energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Penerapan peraturan persetujuan bangunan yang efektif juga vital untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk masa depan, penegakan hukum terhadap peraturan tersebut harus diperkuat, didukung dengan insentif bagi pengembang yang berkomitmen pada keberlanjutan.

Kata Kunci : Kolaborasi, Bangunan Gedung, Pembangunan Berkelanjutan, Iklim Investasi

PENDAHULUAN

Tahun 2021 pemerintah pusat mengeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 26 Peraturan Pelaksanaan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Peraturan ini berhubungan dengan legalitas bangunan sebagai prasarana untuk menunjang kehidupan manusia kini banyak didirikan, salah satunya menunjang sebuah kegiatan investasi dan sebuah usaha. Saat ini izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik bangunan. Salah satu dasar hukum IMB adalah UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diatur dalam (Indonesia, 2020) dan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021). PBG adalah perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya. PBG berlaku untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu ketentuan utama (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021) adalah Peraturan yang mengatur dan memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan integritas struktural bangunan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan standar bahan konstruksi, spesifikasi desain, dan kepatuhan terhadap peraturan bangunan untuk mencegah kecelakaan dan memastikan umur panjang struktur. Dengan menegakkan peraturan ini, pemerintah dapat melindungi kesejahteraan warga dan melindungi terhadap potensi bencana yang disebabkan oleh praktik konstruksi di bawah standar. Selain itu, peraturan persetujuan bangunan juga membantu menjaga daya tarik estetika kota-kota dengan memastikan bahwa pembangunan baru selaras dengan inisiatif arsitektur dan perencanaan kota yang ada. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan.

Misalnya, di daerah rawan gempa, peraturan bangunan mungkin mengharuskan struktur diperkuat dengan balok baja dan pondasi khusus untuk menahan aktivitas seismik. Dengan mematuhi peraturan tersebut, pengembang dapat mengurangi risiko keruntuhan saat terjadi gempa bumi dan melindungi nyawa penghuninya. Selain itu, peraturan persetujuan bangunan dapat menentukan ketinggian dan desain bangunan untuk menjaga garis pandang dan mempertahankan gaya arsitektur yang kohesif dalam lanskap kota. Namun, dalam beberapa kasus, peraturan bangunan yang ketat dapat menghambat pengembangan perumahan yang terjangkau dan membatasi ketersediaan pilihan perumahan bagi penghuninya. Misalnya, pembatasan ketinggian dapat menghalangi pengembang untuk membangun gedung apartemen bertingkat tinggi di kawasan padat penduduk, sehingga menyebabkan kekurangan perumahan dan kenaikan harga unit yang ada. Dalam situasi seperti ini, menyeimbangkan permasalahan keselamatan dengan kebutuhan akan perumahan yang mudah diakses menjadi tantangan yang kompleks bagi para perencana kota dan pembuat kebijakan.

Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas peraturan persetujuan bangunan dalam mendorong pembangunan perkotaan yang aman dan berkelanjutan.

Dengan menganalisis studi kasus dan data mengenai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut, makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas konstruksi, keselamatan penduduk, dan estetika kota secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan dan hambatan dalam penegakan peraturan persetujuan bangunan, serta solusi potensial untuk meningkatkan kepatuhan dan memastikan kelangsungan struktur dalam jangka panjang. Pada akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, perencana kota, dan pengembang tentang cara meningkatkan efektivitas peraturan persetujuan bangunan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

.Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa semua bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan isu inti dan dokumentasi. Analisis mendalam dan komprehensif terhadap regulasi terkait investasi dan dokumen lain yang relevan akan dilakukan secara sistematis (harmonisasi). Tinjauan literatur dilakukan melalui pencarian di internet dan penelusuran jurnal. Kemudian, referensi-referensi tersebut dianalisis dengan cara diuraikan secara kualitatif dan disajikan sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ikhtisar Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021

Ruang lingkup dan cakupan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, 2021) merupakan kerangka peraturan komprehensif yang mengatur proses persetujuan proyek konstruksi di Indonesia. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk desain dan spesifikasi bangunan, analisis dampak lingkungan, serta peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses konstruksi. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses persetujuan, memastikan kepatuhan terhadap standar bangunan, dan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan di industri konstruksi. Bagian ini akan memberikan gambaran umum mengenai ketentuan-ketentuan utama peraturan ini dan implikasinya terhadap sektor konstruksi di Indonesia.

Ketentuan dan persyaratan utama dari peraturan ini mencakup kewajiban analisis dampak lingkungan untuk semua proyek konstruksi, penetapan sistem perizinan bagi perusahaan konstruksi, dan persyaratan bagi pengembang untuk memasukkan prinsip-prinsip bangunan ramah lingkungan ke dalam desain mereka. Selain itu, peraturan ini menguraikan tanggung jawab otoritas pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan terhadap standar bangunan dan melakukan inspeksi rutin terhadap lokasi konstruksi. Secara keseluruhan, penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proyek konstruksi di Indonesia, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat setempat.

Penerapan peraturan tersebut akan memberikan dampak yang signifikan bagi pemilik dan pengembang bangunan di Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan biaya yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip bangunan ramah lingkungan dalam desainnya. Hal ini mungkin mengharuskan pengembang untuk berinvestasi pada teknologi, material, dan metode konstruksi baru yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah (Pandelaki et al., 2023). Selain itu, pemilik bangunan mungkin perlu mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pemeliharaan dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa properti mereka tetap mematuhi peraturan. Namun, biaya awal ini diharapkan dapat menghasilkan penghematan jangka panjang bagi pemilik dan pengembang, karena bangunan ramah lingkungan lebih hemat energi dan memiliki biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang. Pada akhirnya, peraturan ini akan mendorong industri ke

arah praktik yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada perbaikan lingkungan hidup secara keseluruhan di Indonesia.

Misalnya, pemilik gedung di Jakarta mungkin perlu berinvestasi pada panel surya dan peralatan hemat energi untuk mematuhi standar bangunan ramah lingkungan dari pemerintah. Dengan melakukan hal ini, pemilik dapat mengurangi penggunaan listrik dan menghemat tagihan listrik dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya mengimbangi investasi awal dalam peningkatan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menguntungkan pemilik properti secara individu, namun juga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas udara di kota secara keseluruhan. Namun, contoh balasan yang lebih rinci dapat berupa skenario dimana pemilik bangunan di daerah pedesaan di Indonesia tidak mampu membayar investasi awal untuk perbaikan berkelanjutan, seperti panel surya dan peralatan hemat energi. Hal ini mengakibatkan tingginya penggunaan listrik dan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon dan polusi udara di wilayah tersebut.

Tantangan Implementasi

Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai peraturan dan insentif untuk praktik pembangunan berkelanjutan dapat menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Tanpa pedoman yang jelas dan dukungan dari lembaga pemerintah, pemilik bangunan mungkin tidak memprioritaskan melakukan perbaikan yang ramah lingkungan. Selain itu, biaya awal dari teknologi berkelanjutan dapat menjadi penghalang bagi banyak pemilik properti, terutama di negara-negara berkembang yang sumber daya keuangannya terbatas. Tanpa akses terhadap pilihan pembiayaan atau insentif yang terjangkau, akan sulit bagi pemilik bangunan untuk membenarkan investasi awal dalam peningkatan yang berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga profesional dan kontraktor terampil yang terlatih dalam praktik pembangunan berkelanjutan. Tanpa akses terhadap para ahli yang berpengalaman, pemilik bangunan mungkin kesulitan mengidentifikasi cara yang paling hemat biaya dan efisien untuk menjadikan properti mereka lebih ramah lingkungan.

Kurangnya keahlian ini dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan dan perbaikan yang tidak efisien, sehingga semakin menghalangi pemilik properti untuk berinvestasi dalam bidang keberlanjutan. Selain itu, tanpa adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang mewajibkan praktik bangunan berkelanjutan, maka hanya ada sedikit insentif bagi pemilik properti untuk memprioritaskan pertimbangan lingkungan dalam pembangunannya. Akibatnya, banyak bangunan terus beroperasi dengan cara yang berbahaya bagi lingkungan, sehingga berkontribusi terhadap perubahan iklim dan masalah lingkungan lainnya. Pada akhirnya, mengatasi hambatan terhadap praktik pembangunan berkelanjutan memerlukan kombinasi insentif keuangan, pendidikan, dan perubahan kebijakan agar perbaikan yang ramah lingkungan lebih mudah diakses dan menarik bagi pemilik properti di seluruh dunia. Meskipun prosedur dan tata cara sudah diatur sedemikian rupa, pada kenyataannya banyak sekali pelaku usaha yang tidak melakukan konsultasi sebagaimana mestinya. Masih banyak pelaku usaha yang tidak mampu menyediakan tenaga konsultan yang bersertifikat saat konsultasi saat penganjuan PBG di Sekretariat PBG, sehingga pertanyaan yang diajukan oleh TPA (Tim Profesi Ahli) banyak yang tidak bisa terjawab. Disinilah peran profesi insinyur disorot terkait profesionalisme, dan peran pentingnya, dimana TPA (Tim Profesi Ahli) adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja dibawah Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Bahkan ada pula yang tidak sabar, sehingga pemohon atau pelaku usaha justru sudah melakukan proses konstruksi/pembangunan sebelum PBG terbit. Permasalahan juga timbul dari ke tiga elemen TPA dalam penyatuan jadwal dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga masih kadang dilakukan secara kolektif demi menyesuaikan jadwal sehingga masih terjadi beberapa keterlambatan.

Peran TPA memang sangat strategis dalam proses konsultasi dengan pemohon atau pelaku usaha yang mengajukan PBG. Secara tidak langsung TPA juga bisa mempercepat proses percepatan terbitnya PBG yang menjadi syarat dan dasar agar proses konstruksi bangunan gedung dapat segera dimulai. Tanpa PBG maka pemohon atau pelaku tidak boleh melakukan aktifitas apapun di lokasi rencana bangunan gedung. Dengan demikian TPA menjadi bagian dan ikut serta membantu pemerintah kabupaten/kota dalam proses percepatan pembangunan yang ada di daerah.

Kapasitas dan sumber daya lembaga pemerintah untuk menegakkan peraturan lingkungan hidup juga memainkan peran penting dalam mendorong praktik pembangunan berkelanjutan. Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tepat, pemilik properti mungkin tidak merasa terdorong untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup atau melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi dampak lingkungannya. Selain itu, lembaga pemerintah perlu memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memberikan panduan dan dukungan kepada pemilik properti yang ingin melakukan perubahan berkelanjutan pada bangunan mereka. Dengan berinvestasi pada sumber daya ini dan memastikan penegakan peraturan lingkungan hidup yang tepat, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan untuk generasi mendatang. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga secara keseluruhan. Dengan mendorong praktik pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat membantu mengurangi konsumsi energi, menurunkan emisi karbon, dan menciptakan ruang hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya, upaya-upaya ini akan menghasilkan lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan dan berketahanan yang mampu bertahan terhadap tantangan perubahan iklim dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang.



Gambar 1. Alur Penyelenggaraan PBG

Potensi konflik dengan proses persetujuan bangunan yang ada, Salah satu tantangan potensial yang mungkin timbul ketika mempromosikan praktik bangunan berkelanjutan adalah konflik dengan proses persetujuan bangunan yang ada. Banyak kota yang menetapkan peraturan dan standar konstruksi yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat menciptakan hambatan bagi pengembang dan pembangun yang ingin memasukkan teknik dan material bangunan ramah lingkungan ke dalam proyek mereka. Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi pemerintah untuk memperbarui dan merevisi peraturan bangunan mereka untuk mengakomodasi praktik berkelanjutan dan mendorong inovasi dalam industri konstruksi. Dengan menyederhanakan proses persetujuan proyek berkelanjutan dan memberikan insentif bagi pengembang untuk membangun proyek ramah lingkungan, kota dapat membuka jalan menuju lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan (Tong & Zhang, 2022).

Peralihan ke arah praktik bangunan yang lebih berkelanjutan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, namun juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan



penghuninya. Dengan mengurangi konsumsi energi, meminimalkan limbah, dan memanfaatkan bahan-bahan terbarukan, kota dapat menciptakan bangunan yang lebih sehat dan efisien sehingga meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Selain itu, dengan menerapkan praktik pembangunan berkelanjutan, kota dapat menarik lebih banyak pengembang dan investor yang sadar lingkungan, sehingga pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lanskap perkotaan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Studi kasus

Contoh keberhasilan penerapan praktik pembangunan berkelanjutan dapat dilihat di kota-kota di seluruh dunia. Salah satu studi kasus yang penting adalah kota Kopenhagen, Denmark, yang telah membuat kemajuan signifikan dalam mempromosikan inisiatif bangunan ramah lingkungan. Melalui peraturan bangunan yang ketat, insentif untuk sertifikasi bangunan ramah lingkungan, dan investasi pada sumber energi terbarukan, Kopenhagen telah mengubah lanskap perkotaannya menjadi model keberlanjutan. Contoh lainnya adalah Portland, Oregon, yang telah menerapkan kebijakan untuk mendorong penggunaan bahan daur ulang dalam konstruksi dan mendukung desain bangunan hemat energi. Studi kasus ini menunjukkan dampak positif praktik pembangunan berkelanjutan terhadap lingkungan dan perekonomian kota.

Tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam mematuhi peraturan ini mencakup biaya awal penerapan praktik berkelanjutan, kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam teknik bangunan ramah lingkungan, dan potensi penolakan dari industri konstruksi tradisional. Selain itu, mungkin ada tantangan dalam mencari bahan-bahan yang berkelanjutan dan memastikan bahwa bangunan memenuhi sertifikasi dan standar yang disyaratkan. Terlepas dari hambatan-hambatan ini, kota-kota seperti Kopenhagen, Wina dan Portland telah menunjukkan bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan masyarakat, serta visi jangka panjang untuk keberlanjutan, tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah lingkungan dan ramah lingkungan. lingkungan perkotaan yang layak secara ekonomi.

Misalnya, Kopenhagen telah menerapkan sistem pemanas distrik yang memanfaatkan limbah panas dari pembangkit listrik dan proses industri untuk menyediakan pemanas pada gedung, sehingga secara signifikan mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Pabrik pembakaran Spittelau adalah salah satu dari beberapa pabrik yang menyediakan pemanas distrik di Wina Austria. Di Portland, kota ini telah memberi insentif pada penggunaan material dan praktik konstruksi berkelanjutan melalui keringanan pajak dan hibah, yang mengarah pada pengembangan bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar sertifikasi LEED (Wikipedia, 2022).



Gambar 2. Pemanas distrik di Kota Wina Austria

Namun, meskipun terdapat keberhasilan-keberhasilan tersebut, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kota mampu mereplikasi inisiatif-inisiatif ini. Misalnya, di Detroit, kurangnya pendanaan dan kemauan politik telah menghambat penerapan praktik berkelanjutan serupa, sehingga menyebabkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan infrastruktur yang tidak efisien. Selain itu, dalam beberapa kasus, gentrifikasi yang dihasilkan dari upaya pembangunan berkelanjutan telah menggusur penduduk berpenghasilan rendah, sehingga menyoroti perlunya strategi perencanaan kota yang lebih adil dan inklusif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan multi-aspek yang tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah dan perencana kota, namun juga anggota masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dan memprioritaskan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan, kota dapat berupaya menerapkan praktik berkelanjutan yang bermanfaat bagi semua penduduk, berapa pun tingkat pendapatannya. Upaya kolaboratif ini sangat penting untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan berkelanjutan tidak hanya berhasil dalam mengurangi dampak lingkungan, namun juga dalam mendorong keadilan sosial dan pertumbuhan inklusif di perkotaan (Fathy, 2019).

Pembelajaran dan praktik terbaik dari keberhasilan proyek pembangunan berkelanjutan dapat dibagikan dan direplikasi di kota-kota lain, sehingga menciptakan efek perubahan positif. Selain itu, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap inisiatif-inisiatif ini dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kemajuan yang dicapai dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan belajar dari pengalaman masa lalu dan terus berupaya melakukan inovasi, kota dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang. Selain itu, kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar kota dapat mengarah pada pengembangan strategi dan solusi baru untuk mengatasi tantangan bersama. Dengan bekerja sama dan memanfaatkan keberhasilan satu sama lain, kota-kota dapat mempercepat kemajuan menuju lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pada akhirnya, upaya kolektif kota-kota di seluruh dunia dapat membawa perubahan global menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang.

Rekomendasi Perbaikan

Memperkuat kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai peraturan dan penerapan praktik berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui kampanye, lokakarya, dan program pendidikan yang memberikan informasi kepada warga tentang manfaat keberlanjutan dan bagaimana

mereka dapat berkontribusi terhadap kota yang lebih berkelanjutan. Selain itu, membina kemitraan dengan bisnis lokal, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah dapat membantu memanfaatkan sumber daya dan keahlian dalam menerapkan inisiatif berkelanjutan. Dengan bekerja sama dan melibatkan masyarakat, kota dapat menciptakan pendekatan keberlanjutan yang lebih inklusif dan partisipatif yang memberikan manfaat bagi seluruh penduduknya. Melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan suara mereka didengar adalah kunci untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang benar-benar berkelanjutan. Dengan mendorong kolaborasi dan partisipasi, kota dapat memanfaatkan beragam pengetahuan dan keterampilan penduduknya untuk mengembangkan solusi inovatif terhadap tantangan keberlanjutan. Pada akhirnya, dengan menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di kalangan warga, kota dapat menciptakan budaya keberlanjutan yang akan bertahan hingga generasi mendatang.

Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam perizinan bangunan dan perencanaan kota juga penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan menyederhanakan proses dan memastikan komunikasi yang jelas antar departemen, kota dapat menghindari penundaan dan konflik yang tidak perlu yang dapat menghambat kemajuan menuju tujuan keberlanjutan. Selain itu, mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pemerintah dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan inklusif. Kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan utama lainnya sangat penting dalam mengatasi tantangan perkotaan yang kompleks dan menciptakan kota yang berketahanan dan berkembang untuk semua. Misalnya, ketika sebuah kota menerapkan program pengelolaan sampah baru yang melibatkan banyak departemen, komunikasi yang jelas dan proses yang disederhanakan dapat memastikan bahwa jadwal pengumpulan dipatuhi dan tujuan daur ulang tercapai. Dengan berbagi laporan kemajuan secara terbuka dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, kota ini dapat membangun kepercayaan dan dukungan terhadap inisiatif keberlanjutan, sehingga menghasilkan keberhasilan yang lebih besar secara keseluruhan dalam mencapai tujuan lingkungan hidup.

Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha lokal juga dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan program-program tersebut. Dengan bekerja sama dengan dunia usaha untuk mengurangi limbah dan menerapkan praktik berkelanjutan, kota dapat menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan sadar lingkungan. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan inisiatif keberlanjutan juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang mengarah pada keterlibatan dan komitmen jangka panjang untuk menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Pada akhirnya, dengan membina kemitraan yang kuat dan secara aktif melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kota dapat secara efektif mengatasi tantangan perkotaan yang kompleks dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berketahanan bagi semua orang.

Mengatasi kesenjangan dan inkonsistensi dalam regulasi praktik berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kota mampu menerapkan dan menegakkan inisiatif ini secara efektif. Hal ini memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman komprehensif yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Selain itu, berinvestasi dalam program pendidikan dan penjangkauan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan membangun dukungan terhadap praktik berkelanjutan di kalangan masyarakat. Dengan mengatasi kesenjangan dan inkonsistensi ini, kota dapat memastikan bahwa upaya keberlanjutannya berhasil dan memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Selain itu, membangun kemitraan dengan institusi akademis dan organisasi penelitian dapat memberikan kota akses terhadap data dan keahlian yang berharga untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan mereka. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, kota dapat menyesuaikan inisiatif keberlanjutannya untuk mengatasi tantangan dan peluang spesifik dalam lingkungan

perkotaannya yang unik. Pada akhirnya, dengan memupuk budaya kolaborasi dan inovasi, kota dapat membuka jalan bagi masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

KESIMPULAN

Temuan utama dari artikel ini menyoroti bahwa kolaborasi dan inovasi merupakan kunci penting dalam memajukan keberlanjutan di perkotaan. Melalui kerja sama antara pemangku kepentingan dari berbagai sektor, kota dapat memanfaatkan sumber daya, keahlian, dan data untuk mengatasi tantangan keberlanjutan. Investasi dalam sumber energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, dan transportasi berkelanjutan juga menjadi langkah penting dalam upaya tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pendidikan tentang praktik berkelanjutan juga menjadi prioritas penting.

Penerapan peraturan persetujuan bangunan yang efektif juga merupakan faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan di perkotaan. Peraturan ini memastikan bahwa proyek konstruksi baru mematuhi standar bangunan ramah lingkungan dan efisiensi energi. Dengan menegakkan peraturan ini, kota dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan berketahanan bagi penduduknya.

Untuk masa depan, penting bagi kota untuk terus memperkuat upaya penegakan hukum terhadap peraturan persetujuan bangunan. Hal ini mencakup peningkatan inspeksi, penerapan hukuman yang lebih ketat, dan pemberian insentif bagi pengembang yang berkomitmen pada keberlanjutan. Melalui pendekatan proaktif dan pemantauan yang berkelanjutan, kota dapat memimpin dalam memajukan praktik pembangunan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, menginspirasi komunitas lain untuk mengikuti jejak mereka.

DAFTAR PUSATAKA

- Fathy, R. (2019). *Pembangunan Inklusif: Perspektif Alternatif Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan*.
- Indonesia, P. R. (2020). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. 052692, 1–1187.
- Pandelaki, G., Wawointana, T., Tarore, S., & Karouw, J. (2023). Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), Article 2.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pub. L. No. 16 (2021).
- Tong, Y., & Zhang, R. (2022). Investigating the multiple mechanisms of tourism economy affecting sustainable urban development of Chinese cities: Based on multi-source data. *Environment, Development and Sustainability*, 26(1), 1781–1808. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02785-7>
- Wikipedia. (2022). Pemanasan distrik. In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemanasan_distrik&oldid=22372807